KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGRI SAMUEL PANGIHUTAN*, LESSON SIHOTANG**

Samuel Pangihutan¹, Lesson Sihotang²

samuelhutabarat2604@gmail.com¹, sihotangmarsoit78@gmail.co.id²

Universitas HKBP Nommesen

Abstrak: Penegakan hukum ialah bentuk usaha untuk menciptakan ketertipan dan keamanan didalam kehidupan Masyarakat baik dalam usa pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di auatu negara yang menentukan perbuatan apa yang dapat di lakukan dan perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan. Dalam proses penegakan hukum diperlukan adanya bukti yang kuat untuk dapat diberikan kepada hakim dan hakim bisa meyakini bahwa terdakwa betul-betul melakukan sebuah tindak pidana dan kepadanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan yang di dakwakan kepadanya, untuk memperkuat pembuktian baik dari pihak penasehat hukum ataupun dari pihak penuntut umum maka dihadirkan saksi ahli yangmemiliki keahlian keiluan dibidangnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Katakunci: Penegakan Hukum,Hukum Pidana, Pembutian

Abstract: Law enforcement is a form of effort to create order and security in the life of the community, both in prevention efforts and eradication or action after a crime has occurred. Criminal law is part of the entire law in force in a country that determines what actions can be done and what actions cannot be done. In the process of law enforcement, strong evidence is needed to be given to the judge and the judge can believe that the defendant actually committed a crime and he can be sentenced according to what was charged to him, to strengthen the evidence both from the legal advisor and from the general discussion, expert witnesses are presented who have scientific expertise in their fields related to the crime.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Law, Proof

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salahsatu usaha untuk mencitakan ketertipan dan ke amanan, di dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Apabila undang undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum sesuai dengan tujuan dari palsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam Upaya penegakan hukum akan lebihmencapai sasaran.

Hukum pidana alah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menadakan dasar dasar dari suatu negara yang menentukan perbuatan yang dapat dilakukan dan perbuatan apa yang tidak dapat di lakukan ataupun yang dilarang, yang mana biasanya di sertau dengan sangsi negatife yang berupa pidana untuk perbuatan yang di larang. Di dalam pelaksanaan KUHP dijelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari keberan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebera yang selengkapanya dari perbuatan perkara.

Didalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang mempunyai peranan penting di dlama menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku. Tetapi dalalam praktiknya sering juga di jumpai masalah dalam terkait dengan hal pembuktian, yaitu saksi-saksi korban atau pelaku dlaam hal tidak mau memberikan keterangan, pembuktian di jadikan dasar atau pattokan bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan, pembuktian di padang sebagai suatu yang tidak memihak opjektif dan membrikan informasi yang benar kepada hakim untuk memberikan Keputusan yang seadil adilnya.

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan sidang peradilan. Melalui pembuktian dapat di tentukan bagaimana kelanjutan persidangan, karena dengan pembuktian ini lah hakim dapat mengetahui apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang ditentukan pidananya akan di jatuhkan pada terdawa yang telah terbukti bersalah.

Apabila pembuktian dari alat alat bukti undang- undang tidak cukum , maka terdawa di bebaskan dari segala hukuman, dan jika sebaliknya terdakwa dapat di buktikan akan kesalahannya, maka terdakwa dapat di nyatakan bersalah dan kepadanya akan di jatuhkan hukuman.

Hakikat pembutiktian pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat sangat penting untuk meentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Pembuktian dlaam proses pidana ketika polisi telah melakukan penylidikan dan penyididikan yang kemudian pihak penyidik melimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang di awali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta dan bukti yang ada pada saat persidangan guna membuktikan seseorang yang di dakwa telah melakukan tidan pidana, serta berpegang pada keyakinan haki, yang mana pada ahirnya hakim akan menjatuhkan fonis kepada terdakwa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Metode jenis penelitian yang di gunakan yakni normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek kepustakaan yang berupa tulisan ataupun buku buku , artikel, serta majalah majalah yang berkaitan dengan penulisan ini. Yangmana bertujian untuk menemukan suatu atruan hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pembuktian Dalam Perkara Pidana

Ditinjau pada ketentuan pasal 183KUHP dapat di pahami bahwa dua alah bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 184 ayat (1) KUHP tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat alat bukti yang sah tersebut hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi, dah bahwa terdakwa telah bersalah

melakukan tindak pidana tersebut.¹

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan penguraian alat bukti dan bagaimana cara-cara alat bukti itu di pergunakan dan dengan bagaimana cara hakim menentukan keyakinan sumber sumber pembuktian yakni

1. Undang-Undang
2. Doktrin atau ajaran
3. Yurisprudensi

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting di acara pidana. Dan dalam hal ini hakasasi manusia di pertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk ini lah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Negatief Wettelijk

Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem pembuktian perbuatan yang didakwakan. Sistem atau pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Sistem yang di maksud tersebut yakni:

1. Sistem atau pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu artinya jika telah terbukti perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak di perlukan sama sekali sistem ini disebut dengan teori pembuktian formal. (*formale bewijstheorie*)

Sistem ini menitik beratkan pada adanya bukti yang sah menurut undang undang meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang undang maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah di sumpah secara Istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim meski menjatuhkan hukuman kepada terdakwa meskipun barangkali hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berdosa. Namun demikian sebaliknya apabila syarat dua saksi itu tidak di penuhi maka hakim harus membebaskan terdakwa meskipun hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu.

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terkait oleh suatu peraturan.

Menurut sistem ini, dianggap bahwa cukuplah hakim mendasarkan terbuktinya atas keadaan belaka dengan tidak terikat oleh satu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang logis. (*La Conviction Rais onnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinan, keyakinan yang mana didasarkan kepada dasar dasar pembuktian disertai suatu Kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan. Oleh karena sistem ini meberika kebebasan terlalu besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa

¹ Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2 (2018): 19-33.

karena yakin aka napa yang di dakwakan.

4. Teori pembuktian berdasarkan perundang undangan secara negatife. (*Negatief Wettelijk*)

HIR, maupun KUHAP. Baik yang lama maupun baru semuanya menganut sistem atau pembuktian berdasar undang undang secara negatife (*Negatief Wettelijk*) hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 Hir.

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara nrgatifsebaiknya dipertahankan berdasar dua alasan. Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Jangan lah hakim memidana orang akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan orang tersebut. Yang kedua adlaah berfaedah jika ada aturan hakim yang mengikat dalam Menyusun keyakinannya supaya ada patokan yang harus di turut oleh hakim dalam memngambil putusanya.

Jadi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat di buktikan dengan sekurang kurangnya dua alatbukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan terdakwa dianggap salah minimum dengan dua alatbukti supaya hakim dapat menjatuhkan pidana harus dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Perkara Pidana Dipengadilan negeri

Kata pembuktian berasal dari kata bukti yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda '*bwijis*' yang mana berarti seusatu yang menyatakan kebenaran atas suatu kejadian atau peristiwa, namun dalam kamus hukum '*bwijis*' diartikan bahwa sebagai suatu yang memperlihatkan kebenaran dan atau fakta tertentu atau tindakan kebenaran fakta lain oleh parapihak dalam perkara pengadilan ynag berguna untuk memberi bahan kepada hakim dalam memutus perkara.

Menurut J.C.T. Simorangkir pembuktian yaitu usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan satu perkara yang bertujuan supaya dapat di pakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan Keputusan dalam perkara yang di dakwakan kepada seseorang terdakwa.

Dalam upaya pembuktian itu berbagaimacam cara di gunakan oleh yang berwenang baik itu penasehat hukum maupun dari jaksa penuntut umum, keterangan ahli merupakan salah satu upaya yang sangat sering digunakan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di persidangan, karena pembuat Undang- Undang menyadari bahwa pentingnya kolaborasi ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peran dalam pengadilan.

Pendapat ahli adalah informasi dari seseorang yang dengan keahliannya khusus. Metode kejahatan telah berkembang secara signifikan selama bertahun tahun, begitu pula kualitas bukti yang dibutuhkan unutup membangun sebuah kasus hal ini menyebabkan perlunya keseimbangan antara penggunaan metode pembuktian yang berkualitas, yang membutuhkan pengetahuan keterampilan, dan keahlian, dengan metode yang lebih mudah di akses oleh Masyarakat.

Dimana ahli menurut KUHAP alah: keterangan keterangan yang dapat dari seseorang yang mana orang tersebut memiliki keahlian khusus tentang hal yang di berikan unutup membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini dinyatakan sebagai alat bukti yang sah jikan dinyatakan didepan persidangan dan di bawah sumpah.²

Keterangan ahli ini urgensinya terlihat jelas pada tindak pidana yang menyangkut kejahatan tentang nyawa dan tubuh. Menurut pasal 133 ayat (1) dengan sendirinya penyidik harus meminta pendapat ahli kedokteran kehakiman atau dokter serta ahli lainnya yang menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

² Arini, Khafifah Nuzia, and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana." *Syariatati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.2 (2021): 245-256.

Dalam pemecahan tindak pidana kriminal para ahli di bidang ilmu forensic diantaranya

1. Ilmu kedokteran forensic
2. Ilmu kimia forensic
3. Ilmu racun forensic
4. Ilmu fisika forensic
5. Psikiatri/neurologi forensic

Dalam pelanggaran hakcipta juga dapat di minta bantuan seorang ahli untuk menjelaskan hal hal terkait dengan pelanggaran tersebut. Ahli yang bisa di tetapkan sebagai ahli yang menguasai bidang ini adalah dengan hak cipta atau pejabat yang ditunjuk olehnya, jadi keterangan ahli tidak selamanya di berikan oleh ahli ahli bidang forensic, akan tetapi juga ahli apapun yang dapat memberi penjelasan mengenai hal hal terkait dengan bidang perkara yang sedang di periksa sesuai dengan bidangnya.³

Kesaksian ahli memiliki ciri khas yaitu adanya saksi yang dapat diidentifikasi. Pada era HIR keterangan ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana. HIR tidak menganggap keterangan alatbukti sebagai keterangan yang sah, namun dapat di anggap sebagai pendapat ahli untuk dijadikan hakim dalam pendapatnya sendiri jika hakim dapat mengagap pendapat ahli tersebut dapat di terima olehnya. Meskipun pendapat itu berada di urutan kedua setelah kesaksian. Disatu sisi berfungsi sebagai pendapat ahli, disisi lain dapat berfungsi sebagai alat bukti surat.

KESIMPULAN

Dalam proses persidangan perkara pidana pembuktian adalah hal yang wajib dilakukan karena hakim dapat menentukan bahwa seseorang bersalah atau dikatakan sebagai terdakwa itu berdasarkan pembuktian yang didapatkan oleh penyidik, dan dalam proses pengambilan Keputusan oleh hakim alat bukti yang harus disertakan minimal dua alat bukti, sistem pembuktian dalam perkara pidana di indonesia adalah berdasarkan undang-undang, yang mana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurang kurangnya dua alatbukti yang sah hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang benar benar melakukannya, dan sebagai bukti tambahan keterangan ahli disebutkan sebagai bukti tambahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2 (2018): 19-33.
- Hulu, Severius, et al. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Darma Agung* 27.1 (2019): 822-833.
- Hulu, Severius, et al. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Darma Agung* 27.1 (2019): 822-833.
- Arini, Khafifah Nuzia, and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.2 (2021): 245-256.
- Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 KUHAP." *Lex Privatum* 5.4 (2017).
- Aryatmaja, I. Kadek, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantra. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.1 (2023): 14-19.

³ Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 KUHAP." *Lex Privatum* 5.4 (2017).

- Suryawandika, I. Kade Dwi. "Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana." *Banua Law Review* 3.2 (2021): 116-133.
- Purba, Onan, and Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Retentum* 2.2 (2020).
- Fathullah, Rafli Ilham. *Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.